



1.103 Pelaku Wisata Jadi Bakal Calon Penerima Dana Hibah

● PHRI Ingatkan Pemanfaatan Uang Tepat Sasaran

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai memanggil pelaku wisata bakal calon penerima dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Nantinya mereka masih akan menjalani proses verifikasi terlebih dahulu.

Seperti diberitakan sebelumnya, dana hibah yang dialokasi Kemenparekraf untuk Kota Yogyakarta ialah Rp33,18 miliar. Sebanyak 70 persen, atau Rp 23,229 miliar, akan diberikan kepada hotel dan restoran, sedangkan sisanya 30 persen bakal dikelola Dinas Pariwisata setempat.

Kasubbid Penagihan dan Keberatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Rohmad Romadhon menandaskan, total bakal calon penerima dana hibah tersebut mencapai 1.103 pelaku pariwisata. Yakni, terdiri dari 587 hotel, kemudian 516 restoran.

"Sudah kami kirimkan. Kalau petugas kantor pos tidak bisa menemui alamatnya, surat itu akan dikembalikan pada kami, lalu kami kirim secara manual," tandasnya, kemarin (6/11).

Menurut Rohmad, mereka yang menerima surat dari Pemkot belum dipastikan menerima dana hibah, karena semua bakal calon penerima masih akan diverifikasi lebih dulu. Terutama, menyangkut sederet persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para

pengelola hotel, maupun restoran.

"Ya, antara lain masih berdiri dan beroperasi hingga Agustus, memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang masih berlaku, kemudian tercatat taat membayarkan pajaknya, untuk tahun 2019," ungkap Rohmad.

"Jadi bakal calon penerima sudah harus menyiapkannya ya, lalu berkas-berkas tersebut dijadikan satu bendel, kemudian dikumpulkan sesuai jadwal yang kami sertakan di dalam surat itu, antara 10-13 November 2020," imbuhnya.

Setelah dilakukan verifikasi oleh internal BKAD, berkas akan diajukan pada inspektorat untuk diputuskan siapa saja yang ditetapkan sebagai calon penerima dana hibah. Nantinya, para penerima akan ditetapkan lewat SK Wali Kota dan dilanjutkan dengan proses perjanjian hibah. Mengebai nominal yang akan diterima masing-masing hotel dan restoran, tambahnya, bakal dihitung berdasar kontribusi pajak yang telah diberikan dan dikalikan dengan prosentase. Dengan begitu, dana hibah dari Kemenparekraf tersebut, akan terbagi habis secara proporsional.

"Pemanfaatannya untuk operasional. Teknisnya disesuaikan dengan kebutuhan penerima ya, entah itu gaji karyawan dan sebagainya. Penggunaan harus dipertanggungjawabkan. Paling tidak rencana

anggaran belanja dan ada bukti nota atau kwitansi," pungkasnya.

Sesuai prosedur

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengingatkan para pelaku wisata yang nantinya menerima dana hibah dari Kemenparekraf RI, supaya dapat memanfaatkannya sesuai prosedur.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryorio mengatakan bahwa Kemenparekraf sudah menetapkan teknis pemanfaatan dana hibah itu adalah untuk menunjang operasional unit usaha. Sehingga, ia mewanti-wanti pengelola hotel, maupun restoran, supaya berhati-hati.

"Karena ini harus ada pertanggungjawabannya. Jadi, setiap hotel, atau restoran, misal dananya buat bayar gaji, ya harus ada tanda tangan karyawan," ujarnya.

"Tidak mungkin digunakan untuk hura-hura dalam situasi seperti ini. Kita harus memperhatikan karyawan ya, supaya kelangsungannya dapat bertahan lebih lama dan berharap pandemi segera berakhir," imbuh Deddy.

Ia pun menyatakan, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan PHRI kota dan kabupaten di seluruh DIY, agar bisa ikut serta mengawal proses dana hibah ini. Sehingga, saat dana hibah disalurkan, tidak ada pihak-pihak yang merasa dikesampingkan karena tak terjajah. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005